

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Yogyakarta.
- Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali, 2013, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Inter-Parliamentary Union, 2016, *Human Rights*, Office of the High Commissioner for Human Rights, Geneva.
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 1949, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Massachusetts.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Mahfud MD, Moh., 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.

Siahaan, Maruarar, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.

Soemantri, Sri, 1972, *Hak Menguji Materiil di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Sumadi, Ahmad Fadlil, 2013, *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Seta Pers, Malang.

Tanya, Bernard, Yoan Simanjuntak, dan Markus Hage, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

## **Jurnal**

Ali, Mohamad Mahrus, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Syukri Asy'ari, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat serta Memuat Norma Baru", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 3, September 2015.

Chalid, Hamid dan Arief Ainul Yaqin, "Studi Tentang Hukum Air Dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Air Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2, April-Juni 2018.

Handayani, Yeni, "Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat", *Jurnal Rechts Vinding*.

Indrayana, Deny dan Zainal Arifin Mochtar, "Komparasi Sifat Mengikat Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara", *Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3, Oktober 2007.

- Iqbal, Moch., "Aspek Hukum Class Action dan Citizen Law Suit serta Perkembangannya di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No.1, Maret 2012.
- Kasim, Helmi, "Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, Juni 2015.
- \_\_\_\_\_, "Perspektif Konstitusional Kedudukan Negara dan Swasta dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, Juni 2016.
- Maulidi, Mohammad Agus, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 4, Oktober 2017.
- Rachman, Irfan Hur, "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vo. 13, No. 1, Maret 2016.
- Safiuddin, Sahrina, "Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai", *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 1, Februari 2018.
- Saleo, Admon, "Pengakuan Masyarakat Adat tentang Hak Ulayat", *Lex Privatum*, Vol. 2, No. 1, Januari-Maret 2014.
- Triana, Heribertus Jaka dan Aminoto, "Implementasi Standar Internasional Hak Ekosob Oleh Pemerintah Propinsi DIY", *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 3, Oktober 2009.

### **Kovenan Internasional**

- Convention on the Elimination all of Forms Discrimination Against Women, G.A. Res. 34/180, December 18, 1979*, telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- Convention on the Rights of the Child, G.A. Res. 44/25, November 20, 1989*, telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.
- Dublin Statement on Water and Sustainable Development, U.N.HRC. Res A/HRC/15/L.14, January 31, 1992.*
- General Comment of International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights no. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health, U.N. CESCR E/C.12/2000/4, August 11, 2000.*

*General Comment of International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights no. 15: The Right to Water, U.N. CESCR E/C.12/2002/11, January 20, 2003.*

*International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights, G.A. Res. 2200A, December 16, 1966, telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.*

*Mar Del Plata Action Plan, 16th Plenary Meeting, 26 March, 1977.*

*Stockholm Declaration on Human Environment, 21st Plenary Meeting, June 16 1972.*

*The Human Right to Water and Sanitation, G.A. Res 64/292, July 28, 2010.*

*The 2030 Agenda for Sustainable Development, G.A. Res. A/RES/70, September 25, 2015.*

*Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217A, 10 December 10, 1948.*

### **Laporan, Publikasi, dan Hasil Penelitian**

Ardiansyah, 2012, "Perkembangan Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Era Otonomi Daerah", *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017, "Buku Kinerja PDAM 2017", Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta.

Dwi Rakanthi, Nila, 2016, "Implikasi Hukum Atas Dikabulkannya Gugatan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013)", *Penulisan Hukum*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

Howard, Guy and Jamie Bartram, 2003, "Domestic Water Quantity, Service Level and Health", World Health Organization, Geneva.

Iskandar, Andi Sutomu Iqwal, 2016, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Mengenai Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air", *Penulisan Hukum*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Buku I Agenda Pembangunan Nasional”, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019, “Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024”, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

Majidi, Lutpi, 2017, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Terhadap Pemenuhan Asas Kemanfaatan Hukum dan Keadilan”, *Tesis*, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Samsul, Inosentius, 2009, “Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Laporan Penelitian*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

World Health Organization and United Nations High Commissioner for Human Rights, 2003, “The Right to Water”, World Health Organization, France.

## **Majalah**

Hendraputra, Ade, *et. all.*, “Percepatan Pembangunan Infrastruktur Air Bersih”, *Sustaining Partnership*, 2017.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230).

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5460).

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801).

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802).

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 232).

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Peraturan Menteri PUPR No 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891).

### **Pidato**

Maria Sriwulani Sumardjono, “Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Agraria, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 14 Februari 1998.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 15 Desember 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005, Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 19 Juli 2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008, Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1 Juli 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 Mei 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 18 Februari 2015.

### **Sumber Internet**

Badan Pusat Statistik, “Presentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Air Minum 2000-2006”, <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/10/1361/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-dan-sumber-air-minum-2000-2016.html>, diakses pada 2 Oktober 2019.

Biro Komunikasi Publik, “Hasil Evaluasi Kinerja PDAM 2018, Jumlah PDAM Sehat Bertambah”, <https://www.pu.go.id/berita/view/16400/hasil-evaluasi-kinerja-pdam-2018-jumlah-pdam-sehat-bertambah>, diakses pada tanggal 30 September.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, “Ditjen Cipta Karya Gandeng Kemenko Perekonomian Untuk Capai Target 100% Akses Air Minum”, <https://www.pu.go.id/berita/view/15353/ditjen-cipta-karya-gandeng-kemenkoperekonomian-untuk-capaitarget-100-akses-air-minum>, diakses pada 2 September 2019.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, “Pemerintah dan DPR memulai Pembahasan RUU SDA”, <https://www.pu.go.id/berita/view/15941/pemerintah-dan-dpr-memulai-pembahasan-ruu-sda>, diakses pada 22 Juli 2019.

Prolegnas Prioritas 2017, <http://dpr.go.id/uu/prolegnas/year/2017>, diakses pada 20 Juli 2019.

Prolegnas Prioritas 2018, <http://dpr.go.id/uu/prolegnas/year/2018>, diakses pada 20 Juli 2019.

Prolegnas Prioritas 2019, <http://dpr.go.id/uu/prolegnas/year/2019>, diakses pada 20 Juli 2019.

United Nation Water Decade Programme on Advocacy and Communication, *The Human Right to Water and Sanitation: Media Brief*, [https://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human\\_right\\_to\\_water\\_and\\_sanitaton\\_media\\_brief.pdf](https://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitaton_media_brief.pdf), diakses pada 5 November 2019.

### **Surat Edaran**

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air Dan Kontrak Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dalam Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan.